

BAB IV

KONSIDERAN-KONSIDERAN YANG MEMPENGARUHI JEPANG MENGAMBIL KEBIJAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP CHONGRYON

Pada Bab ini, akan menjawab rumusan masalah dengan menerapkan kerangka berpikir yang terkait serta membuktikan hipotesa. Permasalahan dalam skripsi ini Mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Chongryon Korea Utara di Jepang.

Sikap diskriminatif yang dilakukan oleh Jepang terhadap komunitas Korea Utara di Jepang dapat dianalisa menggunakan Teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional merupakan prosedur pembuatan keputusan yang dipandu dengan mendefinisikan situasi dengan hati hati, menimbang tujuan, mempertimbangkan seluruh alternative, dan memilih opsi yang paling mungkin untuk mencapai tujuan yang paling tertinggi (Charles William Kegley, 2013-2014). Maka bab IV akan menjelaskan tentang alasan mendasar yang mempengaruhi Jepang dalam membuat kebijakan diskriminatif terhadap Chongryon sebagai berikut

A. Isu Penculikan

Penculikan warga negara tentu menjadi ancaman besar bagi suatu negara. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, banyak warga Jepang menghilang dalam keadaan yang tidak biasa. Dalam penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh pihak berwenang Jepang mendapatkan kesaksian dari agen Korea Utara yang telah membelot mengungkapkan bahwa ada kemungkinan kuat kasus hilangnya warga negara Jepang merupakan penculikan yang dilakukan oleh Utara Korea (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017). Oleh sebab itu pada tahun 1991 Pemerintah Jepang mengangkat isu penculikan di setiap pertemuan nasional maupun internasional yang tersedia. Namun disisi lain Korea Utara dengan keras terus menyangkal keterlibatan apa pun dalam kasus tersebut.

Penculikan warga Jepang adalah masalah kritis mengenai keamanan domestik Jepang. Pemerintah Jepang tetap berkomitmen penuh menuntut Korea Utara mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan semua korban dan mereka segera kembali ke Jepang, terlepas dari apakah mereka secara resmi diidentifikasi sebagai Korban penculikan oleh Korea Utara atau bukan. Setidaknya terdapat 17 orang warga negara Jepang telah teridentifikasi menjadi korban penculikan.

Tabel 4.1 Penculikan warna negara yang teridentifikasi oleh Jepang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	TAHUN PENCULIKAN
1	Yutaka Kume	Laki laki	52	1977
2	Kyoko Matsumoto	Perempuan	29	1977
3	Megumi Yokota	Perempuan	13	1977
4	Minoru Tanaka	Laki laki	28	1978
5	Yaeko Taguchi	Perempuan	22	1978
6	Yasushi Chimura	Laki laki	23	7 Juli 1978
7	Fukie Chimura	Perempuan	23	7 Juli 1978
8	Kaoru Hasuike	Laki laki	20	31 Juli 1978
9	Yukiko Hasuike	Perempuan	22	31 Juli 1978

10	Shuichi Ichikawa	Laki laki	23	12 agustus 1978
11	Rumiko Masumoto	Perempuan	24	12 agustus 1978
12	Hitomi Soga	Perempuan	19	12 agustus 1978
13	Miyoshi Soga	Perempuan	46	12 agustus 1978
14	Toru Ishioka	Laki laki	22	Sekitar tahun 1980
15	Kaoru Matsuki	Laki laki	26	Sekitar tahun 1980
16	Tadaaki Hara	Laki laki	43	Pertengahan Juni 1980
17	Keiko Arimoto	Perempuan	23	Juli 1983

Sumber : Ministry of Foreign Affairs of Japan

Pada pertemuan puncak pertama Jepang-DPRK yang diselenggarakan pada 17 September 2002, Kim Jong-Il, Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara, akhirnya mengakui telah melakukan penculikan terhadap warga Jepang setelah bertahun-tahun menyangkal, dan meminta maaf. Dia juga menyatakan bahwa di antara 13 korban penculikan, empat orang masih hidup, delapan orang tewas dan satu orang hilang di perbatasan saat masuk ke Korea Utara tidak dapat dikonfirmasi. Selain itu, ia mengakui penculikan Hitomi Soga, yang tidak ada dalam daftar untuk penyelidikan yang diminta oleh Pemerintah Jepang dan menegaskan bahwa ia masih hidup (Di sisi lain, ia mengklaim bahwa Miyoshi Soga dan Hitomi Soga yang telah menghilang pada saat yang sama, belum memasuki Korea Utara.) Selain itu, sementara berjanji untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab dan mencegah terulang kembali kasus penculikan tersebut. Kim meyakinkan Jepang bahwa ia akan memfasilitasi pertemuan antara korban dan keluarga mereka juga. sebagai kembalinya korban ke Jepang.

Dari 28 September hingga 1 Oktober 2002, Pemerintah Jepang mengirim tim investigasi yang bertemu dengan para korban dan berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang korban penculikan yang belum dipertanggungjawabkan. Sayangnya, informasi yang diberikan oleh Korea Utara terbatas sejak awal penyelidikan dan tidak konsisten dalam banyak hal. Misalnya, Korea Utara menyerahkan materi yang diklaim sebagai DNA Kaoru Matsuki, tetapi analisis forensik menunjukkan bahwa DNA ini adalah milik orang lain. Pada pertemuan ke-12 dari negosiasi untuk menormalkan hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Utara yang diadakan dari 29-30 Oktober 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, Pemerintah Jepang mengajukan 150 pertanyaan mengenai ketidakkonsistenan dalam informasi yang diberikan oleh Korea Utara dan meminta informasi lebih lanjut. Namun Jepang tidak menerima respon yang memadai dari Korea Utara.

Pada 15 Oktober 2002, lima korban (Yasushi dan Fukie Chimura, Kaoru dan Yukiko Hasuike, dan Hitomi Soga) kembali ke Jepang dan akhirnya bersatu kembali dengan keluarga mereka. Dengan pertimbangan bahwa lima korban kembali ke Jepang harus diberi lingkungan di mana mereka bebas untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan masa depan keluarga mereka yang masih di Korea Utara, pada 24 Oktober 2002, Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa lima korban akan tetap di Jepang. Pemerintah juga sangat mendesak Korea Utara untuk memastikan keselamatan anggota keluarga mereka masih di Korea Utara dan segera menetapkan tanggal untuk kepulangan mereka ke Jepang.

Pada tanggal 22 Mei 2004, Perdana Menteri Koizumi mengunjungi Korea Utara untuk kedua kalinya dan terlibat dalam diskusi dengan Kim Jong-Il, Ketua Komisi Pertahanan Nasional, mengenai penculikan dan masalah bilateral lainnya, serta masalah keamanan seperti Utara Program nuklir dan rudal Korea. Mengenai masalah penculikan, kedua pemimpin sepakat untuk poin-poin berikut selama pertemuan mereka:

Korea Utara setuju untuk mengizinkan kelima anggota keluarga Yasushi dan Fukie Chimura, dan Kaoru dan Yukiko Hasuike untuk kembali ke Jepang pada hari pertemuan puncak. Korea Utara akan segera melanjutkan investigasi ulang dari awal untuk memberikan laporan lengkap tentang kebenaran. Berdasarkan perjanjian ini, kelima anggota keluarga Yasushi dan Fukie Chimura dan Kaoru dan Yukiko Hasuike kembali ke Jepang bersama Perdana Menteri Koizumi. Tiga anggota keluarga Hitomi Soga kemudian tiba di Jepang pada 18 Juli 2004.

B. Ancaman Nuklir

Hubungan bilateral Jepang dan Korea Utara semakin memburuk setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal, beberapa di antaranya melintasi wilayah Jepang, persepsi Jepang terhadap Korea Utara di Jepang semakin sangat menurun. Terungkap bahwa Korea Utara telah melakukan agenda nuklir Pyongyang dimulai pada 1990-an, Korea Utara

telah dianggap sebagai musuh potensial yang dapat mengganggu keamanan negara oleh masyarakat Jepang. Namun, peningkatan ketegangan dan uji coba rudal yang agresif baru-baru ini meningkatkan kesadaran akan ancaman publik ke tingkat lain. Di bawah tekanan sosial seperti itu, tujuan dan alasan keberadaan Chongryon terus-menerus dipertanyakan (Lee, Japan's North Korean Diaspora, 2018).

Hubungan Jepang dengan Korea Utara agak membaik setelah AS dan DPRK menandatangani Kerangka Kesepakatan mengenai program nuklir Korea Utara pada tahun 1994: Jepang setuju untuk membantu membiayai *the Korean Peninsula Energy Development Organization* (KEDO) yang dihasilkan dari perjanjian tersebut, dan juga menyumbangkan lebih dari 500.000 ton makanan untuk DPRK untuk bantuan kelaparan pada tahun 1995. Beberapa wanita Jepang yang telah pindah ke Korea Utara dengan pasangan mereka sebagai bagian dari "repatriasi" Chongryon juga diizinkan oleh Pyongyang untuk kembali ke Jepang untuk mengunjungi keluarga mereka selama periode ini. Namun, setelah Korea Utara meluncurkan rudal Taepodong dua tingkat pada bulan Agustus 1998, yang melampaui wilayah Jepang tanpa peringatan sebelumnya, Jepang mengeluarkan sanksi terhadap Korea Utara dan membekukan sementara pendanaannya untuk KEDO.

Dialog dilanjutkan pada tahun 2000, ketika Jepang melanjutkan bantuan makanan ke Korea Utara dan Pyongyang terlibat dalam negosiasi dengan Washington mengenai program rudalnya. Lebih dari tiga putaran pembicaraan, Jepang mengisyaratkan bahwa mereka akan bersedia untuk menawarkan paket bantuan ekonomi kepada DPRK, serupa dengan yang ditawarkan kepada ROK pada tahun 1965, sebagai ganti reparasi dan pada normalisasi hubungan. (Paket itu dilaporkan antara \$ 5 dan \$ 10 miliar). Namun, ketidaksepakatan mengenai perselisihan yang berkelanjutan atas penculikan, nuklir, dan isu-isu rudal, menyebabkan kebuntuan dalam negosiasi.

Tidak lama setelah KTT Koizumi-Kim pertama diadakan pada tahun 2002, AS menuduh Korea Utara secara diam-diam mengembangkan program pengayaan uranium yang melanggar Kerangka Kesepakatan. KEDO kemudian menghentikan pengiriman energi ke Korea Utara. Sebagai tanggapan, Korea Utara menyatakan perjanjian tahun 1994 dibatalkan, dan mengundurkan diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, dan mulai memproses ulang plutonium pada tahun 2003. Sebagai solusi damai atas program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara, maka terbentuklah suatu perundingan yaitu *The Six Party Talks* diantara enam negara yaitu Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Jepang.

Beberapa tahun pertama pembicaraan tidak mengarah pada tindakan konkret apa pun yang membatasi program nuklir Korea Utara. Setelah DPRK menguji perangkat nuklir pada 9 Oktober 2006, Jepang memberlakukan sanksi yang melarang semua impor Korea Utara dan melarang feri Mangyongbong memasuki negara tersebut. (Sanksi sepihak ini melampaui ruang lingkup yang diberlakukan oleh Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika proses *Six Party Talks* mulai mendapatkan momentum pada awal 2007, para perunding membentuk "Kelompok Kerja Normalisasi Normalisasi Hubungan Jepang-DPRK" untuk mengatasi penculikan dan masalah reparasi Jepang untuk pemerintahan kolonial. Dalam beberapa pertemuan yang diadakan melalui forum ini, Korea Utara menunjukkan kesediaan untuk mengubah posisi sebelumnya bahwa ia telah sepenuhnya menyelidiki dan menyelesaikan masalah penculikan, tetapi akhirnya mundur dari mencapai kesepakatan baru. Ketika anggota *Six Party Talks* lainnya mulai mengirimkan bahan bakar berat minyak ke Korea Utara sebagai bagian dari proses negosiasi, Jepang menyatakan keengganan untuk menyumbangkan bantuan energi sampai masalah penculikan telah diselesaikan secara memuaskan.

Pada tahun 2009, hubungan Korea Utara dengan Jepang memburuk secara signifikan dengan keluarnya Korea

Utara dari perjanjian the six *party* dan melanjutkan beberapa kali uji coba rudal balistik pada tahun 2012 diikuti oleh uji coba nuklir tahun 2013 hingga saat ini. Pemerintah Jepang menanggapi dengan memperpanjang sanksi yang ada dan mengadopsi langkah-langkah baru, melembagakan larangan menyeluruh atas semua ekspor ke DPRK.

Ancaman nuklir menjadi salah satu pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan diskriminatif Jepang yang harus diterima oleh Chongryon. Chongryon memfasilitasi ekspor ilegal komputer, bahan kimia, peralatan, dan mesin penting untuk Program senjata Pyongyang. Komunitas ini juga mengirimkan uang untuk mendukung rezim Korea Utara.

Diperkirakan, dana Chongryon antara \$ 600 juta dan \$ 1 miliar menjadi milik Korea Utara setiap tahun (Surya Rama Narasimha & Kotecha, 2018). Dana ini merupakan sumber mata uang asing terbesar Korea Utara dan telah diduga bahwa Chongryon secara terselubung terlibat dalam memperoleh mesin berteknologi tinggi seperti pabrik jet yang digunakan dalam pembuatan bom nuklir dan rudal untuk Korea Utara.

Terdapat 18 bank di Jepang yang berwenang untuk berurusan dengan Korea Utara. Pada 1993, Jepang mencatat perdagangan senilai setengah miliar dolar dengan Korea Utara. Di antara barang-barang yang diimpor oleh Jepang adalah kepiting salju yang dibawa oleh kapal Korea Utara.

Uang sering diperas dari warga Korea Utara Jepang oleh Pyongyang dengan mengancam akan mencelakai atau mempersulit hidup bagi keluarga mereka di Korea Utara. Ada laporan para eksekutif di serikat kredit yang digunakan oleh warga Korea Utara Jepang untuk mengambil uang dari rekening pelanggan mereka dan mengirimnya ke Pyongyang.

Menurut Washington Post, "Mantan pejabat Chongryon mengatakan Korea Utara menegaskan bahwa kesejahteraan orang-orang yang dicintai di rumah bergantung pada seberapa sering dan berapa banyak sanak keluarga mereka di Jepang bersedia berkontribusi pada rezim Kim. Pemerasan uang dilakukan melewati Chongryon ke pemerintah" (Fisher, 2013).

Seorang pembelot Korea Utara yang bersaksi di hadapan Senat AS pada Mei 2003, mengatakan bahwa 90 persen dari komponen kunci dalam rudal Korea Utara dibuat di Jepang dan diselundupkan ke Korea Utara dengan bantuan Chongroyon.

Serikat kredit yang terkait dengan Chongryon, yang dikenal sebagai chogins, dilaporkan memainkan peran utama dalam mengumpulkan dan mengirim uang ke Korea Utara, membuat pinjaman palsu atau terlibat dalam praktik penipuan lain untuk secara ilegal mengirimkan dana. Pada akhir 1990-an, beberapa dari chogins yang diatur longgar mengalami kebangkrutan, yang menyebabkan konsolidasi dan bailout multi-miliar dolar dari deposan mereka oleh pemerintah Jepang. Pihak berwenang Jepang kemudian menindak lembaga-lembaga keuangan ini, menempatkan kegiatan mereka di bawah pengawasan yang lebih besar dan menangkap mantan eksekutif karena penggelapan.